KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 6 2 8			H.4 X Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	H.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 8 1 5 0 9 3 1 2 5 7 2 2 0 0 0						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : AKHMAD RANO ZAINUDIN						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1 21-402-01	5.988.500	5.988.500	0	5	299.425	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah : C.3 ID Subunit Organisasi : C.4 Tanggal : C.5 Nama Penandatangan :		2 7 2 2 RAH ATMA HUSADA MAHAK 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3	0 0 0 AM PROVINSI KA	ALIMANTAN	I TIMUR	
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :						
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						

4CIALHTX